



2024

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH**





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak terutama dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyempurnaan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan partisipasinya, dengan harapan pada implementasi pelaksanaan kegiatan nantinya dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan dampak terhadap pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Benteng, 17 Juli 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	50
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	52
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
 III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	60
3.3. Program dan Kegiatan	61
 IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
 V. PENUTUP	
5.1. Catatan Penting	67
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	67
5.3. Rencana Tindak Lanjut	67
 LAMPIRAN	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel T-C.29

Lampiran 2 Tabel T-C.30

Lampiran 3 Tabel T-C.31

Lampiran 4 Tabel T-C.32

Lampiran 5 Tabel T-C.33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan Visi, Misi, (RKPD, RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top-Down dan Bottom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian



sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang ubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai acuan/dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah:

1. Menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.

3. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.
4. Dan dapat bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar di masa akan yang datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

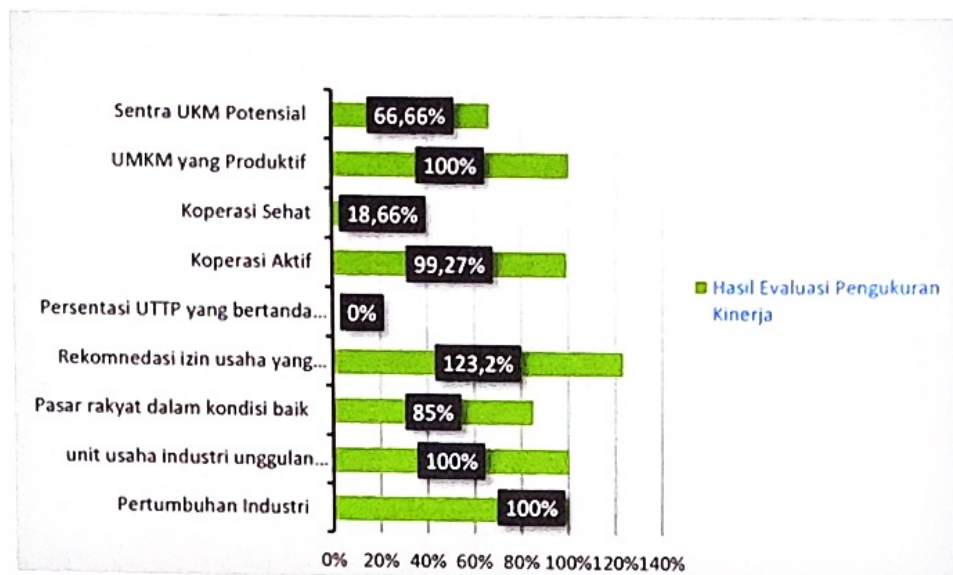
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian sasaran terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah mencakup empat sasaran dalam rencana strategis sesuai misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Meningkatnya kualitas komponen manajemen kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Meningkatnya kemandirian koperasi, IKM, dan UKM
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa).

Gambaran Umum Capaian Program Prioritas yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi kedalam dua jenis urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan, dan pencapaian kinerjanya diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 terdapat program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

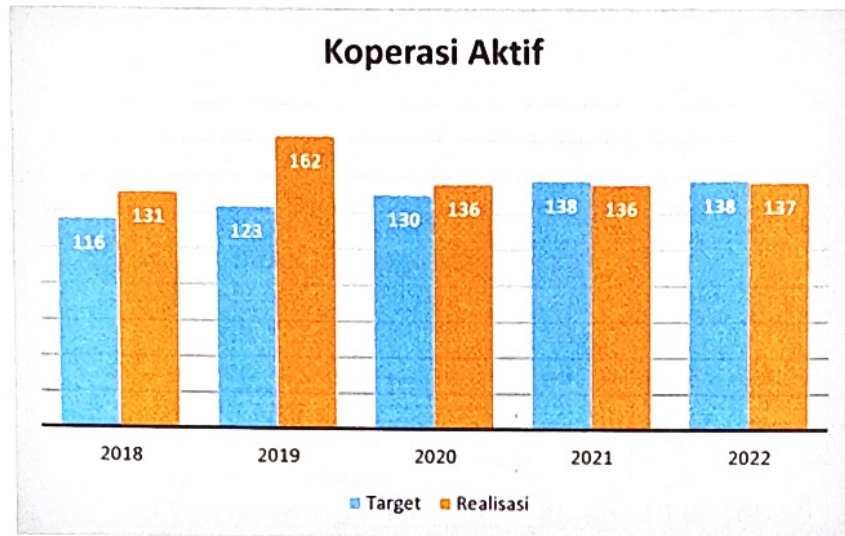
Untuk program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Urusan Wajib yang dilaksanakan

Dalam aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2022 adalah :

Bidang Koperasi dan UKM

Secara garis besar pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Koperasi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada table dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi :			
a.	Persentasi Koperasi Aktif	138	137	99,27
b.	Persentasi Koperasi Sehat	150	28	18,66

- ✓ Jumlah koperasi aktif sampai dengan per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 137 koperasi dari 168 koperasi yang ada.
- ✓ Menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2017-2022 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.
- ✓ Hasil Pemutakhiran data koperasi se Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018 - 2022

Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif	131	162	136	136	137
2	Jumlah koperasi	161	81,48	165	165	168
3	Persentase koperasi aktif	81,37	132	82,42	82,42	81,55

Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2022



Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Benteng					
	Jumlah koperasi aktif	44	44	47	48	48
	Jumlah koperasi	63	63	65	66	67
	Persentase koperasi aktif	69,84	69,84	72,30	72,72	71,64
2	Kecamatan Bontoharu					
	Jumlah koperasi aktif	9	9	10	10	10
	Jumlah koperasi	10	10	11	11	11
	Persentase koperasi aktif	90	90	90,90	90,90	90,90
3	Kecamatan Bontomanai					
	Jumlah koperasi aktif	10	10	11	10	11
	Jumlah koperasi	12	12	13	13	13
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	83,33	76,92	83,33
4	Kecamatan Bontomatene					
	Jumlah koperasi aktif	16	16	16	16	16
	Jumlah koperasi	18	18	18	18	18
	Persentase koperasi aktif	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89
5	Kecamatan Buki					
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	7
	Persentase koperasi aktif	80	80	80	80	71,42
6	Kecamatan Bontosikuyu					
	Jumlah koperasi aktif	12	13	12	12	12
	Jumlah koperasi	15	16	15	15	15
	Persentase koperasi aktif	80	81	80	80	80
7	Kecamatan Pasimasunggu					
	Jumlah koperasi aktif	7	7	7	7	7
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
8	Kecamatan Pastim					
	Jumlah koperasi aktif	4	4	4	4	4
	Jumlah koperasi	4	4	4	4	4
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100
9	Kecamatan Pasimarannu					
	Jumlah koperasi aktif	9	9	9	9	9
	Jumlah koperasi	9	9	9	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100
10	Kecamatan Takabonerate					
	Jumlah koperasi aktif	9	9	10	10	10
	Jumlah koperasi	9	9	10	10	10
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Pasilambena					
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	Total Jumlah koperasi aktif	131	132	136	137	137
	Total Jumlah koperasi	161	162	165	166	168
	Total Persentase koperasi aktif	81,37	81,48	82,42	82,53	81,55

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.48.578.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.413.000,- dengan capaian output 99,66%. Ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 48.578.000,- terealisasi sebesar Rp.48.413.000,- dengan capaian output 99,66 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 163.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.640.000,- dengan capaian output 100 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 163.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.640.000,- dengan capaian output 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.
4. Kondisi pandemi covid-19 dan inflasi yang membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan karena semuanya diarahkan ke penanganan covid-19 dan dampak inflasi.
5. Masih rendahnya pelaksanaan RAT
6. Adanya tunggakan penerima bantuan usaha
7. Kegiatan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya
8. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
9. Terbatasnya tenaga terampil

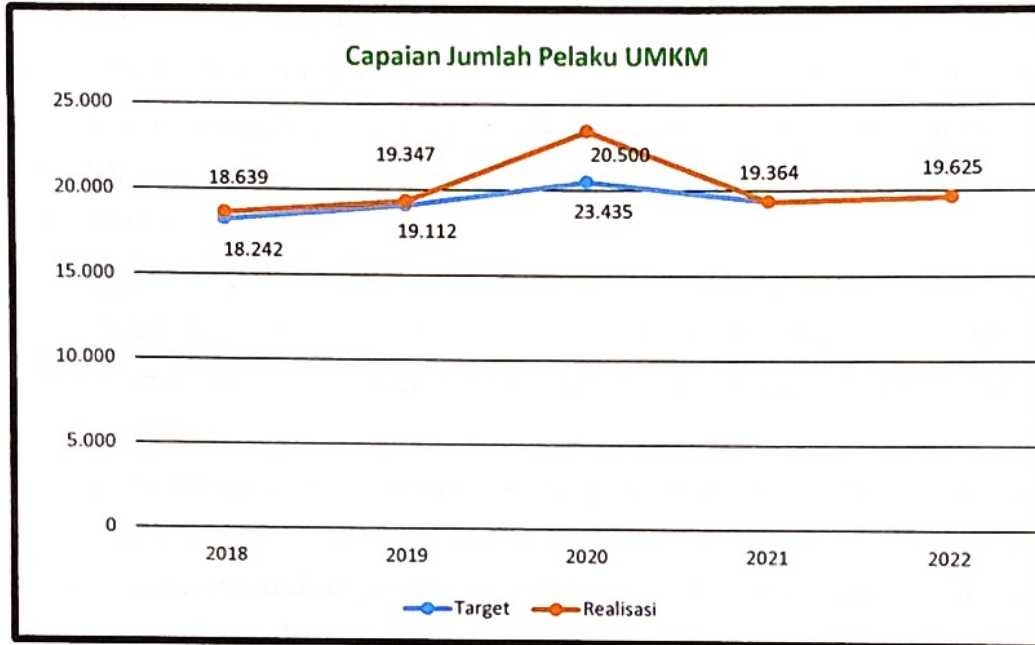
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat;
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN;
3. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha koperasi dan UMKM lainnya
4. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
5. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
6. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
7. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
8. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.
9. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

Capaian program dan kegiatan pendataan pelaku usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL MENENGAH

Gambaran umum pencapaian jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah se-Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Dalam pencapaian tahun ini, data pelaku UKM meningkat sekitar 1,3% dari tahun sebelumnya karena banyaknya pelaku usaha yang terdampak covid-19 dari berbagai sektor, baik dari sector pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor lainnya.

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
	Meningkatnya Kualitas UMKM			
a.	Persentase peningkatan UMKM yang produktif	350 UKM	350 UKM	100
b.	Persentase peningkatan sentra UKM potensial yang dikembangkan	45 UKM	30 UKM	66,66

Pada tahun 2022 persentase jumlah Usaha Kecil Menengah yang aktif yaitu 19.625 dan data terdaftar di SIKP sejumlah 4.875 UKM. Walaupun baru keluar dari pandemi Covid-19 dan terdampak inflasi para

pelaku UKM tetap bisa memproduksi dan menjalankan usahanya dengan baik.

UKM secara keseluruhan dengan pendapatan rata-rata di range Rp. 1.000.000 s/d 5.000.000,- masih mampu bertahan di tengah merosotnya ekonomi global. Di tahun 2022 pasca pandemi Covid-19 masih terjadi inflasi yang berdampak pada penurunan omset pelaku usaha kecil dan menengah yang juga berakibat pada penurunan jumlah produksi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pelaku UKM diuraikan sebagai berikut :

1. Permodalan adalah salah satu masalah UKM yang utama. Efeknya para pelaku usaha tidak mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa meningkatkan pendapatannya.
2. Kurangnya pengalaman tentang manajemen usaha sehingga banyak dari pelaku usaha yang hanya fokus dalam memproduksi barang dan jasa namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnis apalagi mereka kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya berjualan di tempat.
3. Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.
4. Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM kekurangan pangsa pasar dalam hal mendistribusikan produknya dan belum memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

Adapun harapan yang ingin dicapai untuk tahun kedepannya adalah :

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembinaan UKM terus melakukan program pembinaan dan pengembangan UKM. Berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan. Yaitu pertumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk UKM, peningkatan kemampuan sentra serta pemberian bantuan peralatan produksi.

UKM di Kabupaten Kepulauan Selayar selayaknya mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebab UKM merupakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang secara signifikan telah banyak memberikan



kontribusi kepada Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Selain pembinaan yang selama ini di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bidang Koperasi dan UKM, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembangan wirausaha baru. Bidang Koperasi dan UKM terus mendorong wirausaha baru agar menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah serta berperan dalam menanggulangi pengangguran dan menghambat urbanisasi.

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 553.147.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 550.074.000,- dengan capaian output 99,44%. Ini dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 79.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.344.000,- dengan capaian output 99,93%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 203.074.000,- terealisasi sebesar Rp. 202.677.200,- dengan capaian output 99,80%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 237.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.560.000,- dengan capaian output 98,90%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

- d. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 33.513.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.492.800,- dengan capaian output 99,94%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 4.170.915.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.428.412.500,- dengan capaian output 82,20%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan dana sebesar Rp. 4.170.915.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.428.412.500,- dengan capaian output 82,20%. Hal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini berjalan sesuai dengan target.



1. Jumlah / Jenis / Pelaku UKM.

I. Rekap Database Pelaku Ukm

JUMLAH KESELURUHAN PELAKU UKM	19.625 ORANG
-------------------------------------	--------------



II. Rekap Daftar Nama-Nama Kelompok Penerima Bantuan

Total keseluruhan jumlah penerima bantuan dari tahun 2018-2022 sebanyak 500 kelompok, dengan jumlah unit sebanyak 2.183 unit bantuan peralatan.

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 961.277.000,-
terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2 Kelompok	2 unit
2	Pengadaan Amdk	1 Kelompok	1 Unit
3	Pengadaan Masak Memasak	11 Kelompok	55 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit	6 Kelompok	35 Unit
5	Pengadaan Mesin Parut Kelapa	7 Kelompok	35 Unit
6	Pengadaan Alat Pertukangan	10 Kelompok	70 unit
7	Pengadaan Perbengkelan	8 Kelompok	73 Unit
	Jumlah	45 Kelompok	271 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.997.459.250,-
Yang Terdiri Dari Tabel Berikut Ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Parut Kelapa	22 Kelompok	67 Unit
2	Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan	20 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Alat Pertukangan	22 Kelompok	22 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	37 Kelompok	40 Unit
5	Pengadaan Oven Kue	20 Kelompok	20 Unit
6	Pengadaan Alat Vacuum Pres	32 Kelompok	94 Unit
7	Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri	11 Kelompok	11 Unit
8	Pengadaan Mesin Pengering	12 Kelompok	12 Unit
9	Pengadaan Mesin Press Emping	16 Kelompok	16 Unit
10	Pengadaan Alat Kerajinan	17 Kelompok	272 Unit
	Jumlah	209 Kelompok	614 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar Rp. 1.258.575.000,- Yang Terdiri Dari Tabel Berikut Ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Perajang Keripik	15 Kelompok	105 Unit
2	Pengadaan Mesin Jahit Dan	12 Kelompok	60 Unit

	Obras		
3	Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah	5 Kelompok	5 Unit
4	Pengadaan Alat Pertukangan	17 Kelompok	119 Unit
5	Pengadaan Alat Masak Memasak	25 Kelompok	550 Unit
6	Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa	5 Kelompok	5 Unit
7	Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras	11 Kelompok	55 Unit
8	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah	1 Kelompok	2 Unit
Jumlah		91 Kelompok	901 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.245.196.000,-
terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2 Kelompok	2 unit
2	Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti	3 Kelompok	20 Unit
3	Pengadaan Mesin jahit	3 Kelompok	12 Unit
4	Pengadaan Mesin Obras	3 Kelompok	9 Unit
5	Pengadaan Mesin penggiling tepung ikan	1 Kelompok	1 Unit
6	Pengadaan Pertukangan	14 Kelompok	92 unit
7	Pengadaan Mesin Sentri Fugar	4 Kelompok	4 Unit
8	Pengadaan Mesin penggiling Mie	9 Kelompok	27 Unit
9	Pengadaan Mesin Pemeras kelapa	9 Kelompok	9 Unit
10	Pengadaan mesin gula Merah	4 Kelompok	4Unit
	Jumlah	52 Kelompok	180 Unit

Identifikasi permasalahan pada pelaksanaan urusan wajib berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pelaksanaan RAT
2. Adanya tunggakan penerima bantuan
3. Kegiatan usaha tidak berjalan
4. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
5. Terbatasnya tenaga terampil



Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, adalah dengan :

1. Merestrukturisasi Kelembagaan/Penataan sistem dan prosedur kinerja organisasi yang profesional
2. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
3. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya
5. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

Data / Hal-hal lain yang dianggap perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa :
kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
4. Memfasilitasi kemitraan usaaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

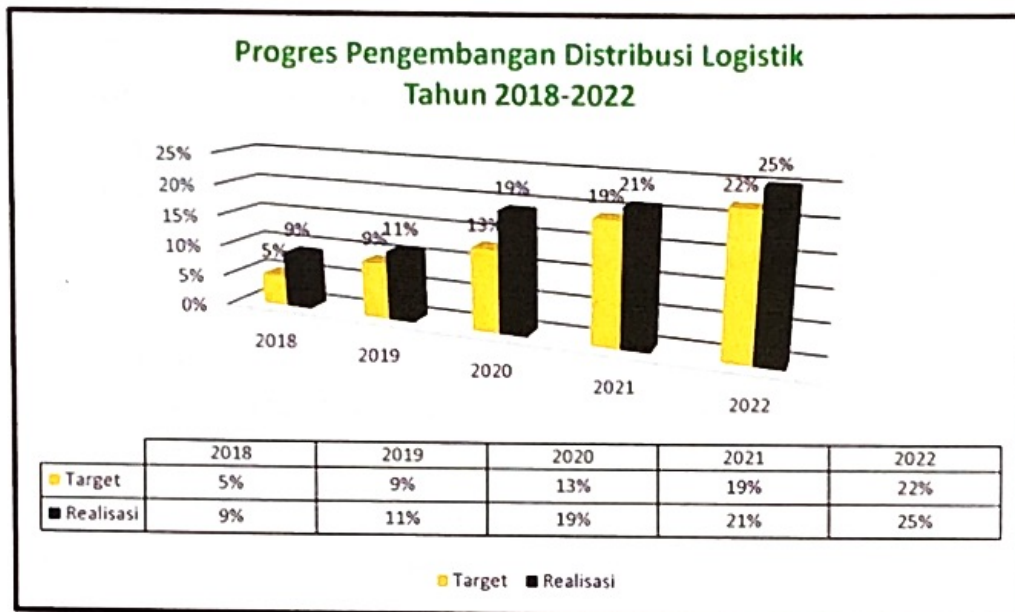
Urusan Pilihan yang dilaksanakan

Dalam aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2022 adalah :

Bidang Perindustrian

1. TERBANGUN DAN BERKEMBANGNYA KAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK (BARANG DAN JASA)

Secara umum progress berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



✓ Dukungan regulasi:

- Perda Kemudahan Investasi, Yakni Perda No.4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentive dan Kemudahan Penanaman Modal, Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019 tentang Tata cara pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Perda RPIK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039
- Perda RPIK Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Perda No.5 Tahun 2012 tentang RT RW Kab. Kep. Selayar Tahun 2012-2032
- Perda No.3 Tahun 2022 tentang RT RW Provinsi Sul-Sel Tahun 2022-2041
- Master Plan kawasan industri Selayar
- Studi kelayakan (Feasibility study) Selayar

✓ Pemetaan Kawasan distribusi logistik sudah dibagi menjadi atas kawasan utama di pematata dan sub kawasan meliputi, kawasan pelabuhan

Benteng, pelabuhan Jampea, pelabuhan Kayuadi, pelabuhan Bonerate dan Kalotoa.

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan kawasan sudah terlaksana dengan anggaran APBD Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000
- ✓ Dokumen Lahan:
 - Sudah ada pernyataan masyarakat pemilik lahan/bersertifikat atas nama Pemda dengan luas lahan 4 Ha yang lokasinya berada di Kawasan Utama Pamatata Kec. Bontomatene.
 - Lahan yang belum dibebaskan kepemilikannya seluas 1.200 Ha, lokasinya juga berada di Kawasan Utama Pamatata Kec. Bontomatene.
 - Dalam tahap perencanaan, seluas 2 Ha untuk masing-masing sub kawasan pelabuhan
- ✓ Minat investasi:
 - PT. Pelindo IV Makassar untuk modernisasi pelabuhan
 - PT. Pelayaran Tanto untuk pengangkutan kontener barang keluar masuk Selayar
- ✓ Langkah Koordinasi dengan:
 - Koordinasi dengan PT. Pelindo IV Makassar untuk pengaktifan kembali distribusi logistik kontainer di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - Koordinasi dengan PT. Pelayaran Tanto tentang rencana kedatangan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kemudian yang menjadi permasalahan pokok sebagai salah satu yang menghambat terwujudnya agenda dimaksud, yaitu terkendala adanya ketidaksesuaian harga lahan dengan penawaran yang diajukan saat dilakukan pembebasan dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian :			
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	25 IKM	25 IKM	100
	b. Jumlah Peningkatan Unit usaha Industri Unggulan Daerah	51 IKM	51 IKM	100



- ✓ Jumlah Pelaku IKM sebanyak 1275 IKM
- ✓ Sentra Pengolahan Ikan berlokasi di Desa Padang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas 1 kelompok binaan
- ✓ Tahun 2019 sentra pengolahan ikan telah mendapatkan bantuan DAK 1 M untuk pembelian peralatan
- ✓ Tahun 2022 sentra pengolahan ikan mendapat bantuan DAK FISIK sebesar 6,4 M dan telah selesai dibangun
- ✓ Tahun 2022 sebagai pendukung kegiatan sentra diberikan DAK Non Fisik sebesar 1,7 M (swakelola)
- ✓ Tahun 2022 sebagai penunjang kegiatan DAK Fisik, telah dianggarkan dana pembebasan lahan sebesar 350 juta dan telah terealisasi
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan ikan tahun 2018-2019 Desa Bonto Sunggu Padang, Kecamatan Bontosikuyu
- ✓ Pembentukan sentra pandai besi tahun 2007 Desa Bungayya Bone lohe Kecamatan Bontomatene
- ✓ Pembentukan sentra pengembangan jambu mente Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur tahun 2021
- ✓ Pembentukan sentra gula merah di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu tahun 2021
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan pisang di Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena Tahun 2022
- ✓ Pembentukan sentra pembuatan kapal rakyat di Desa Limantu Kecamatan Pasimarannu Tahun 2022
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan ikan kering di Desa Kayuadi Kecamatan Takabonerate Tahun 2022
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan jambu mente di Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2022
- ✓ Pembentukan galeri oleh oleh selayar kerjasama Lsm Econatural dan PASMO Pembinaan dan pelatihan secara konsisten terhadap pelaku industri mikro bidang pengolahan ikan, pengolahan turunan kelapa, legalitas usaha industri, kemasan dan labeling, dan lainnya sejak tahun 2016-2022

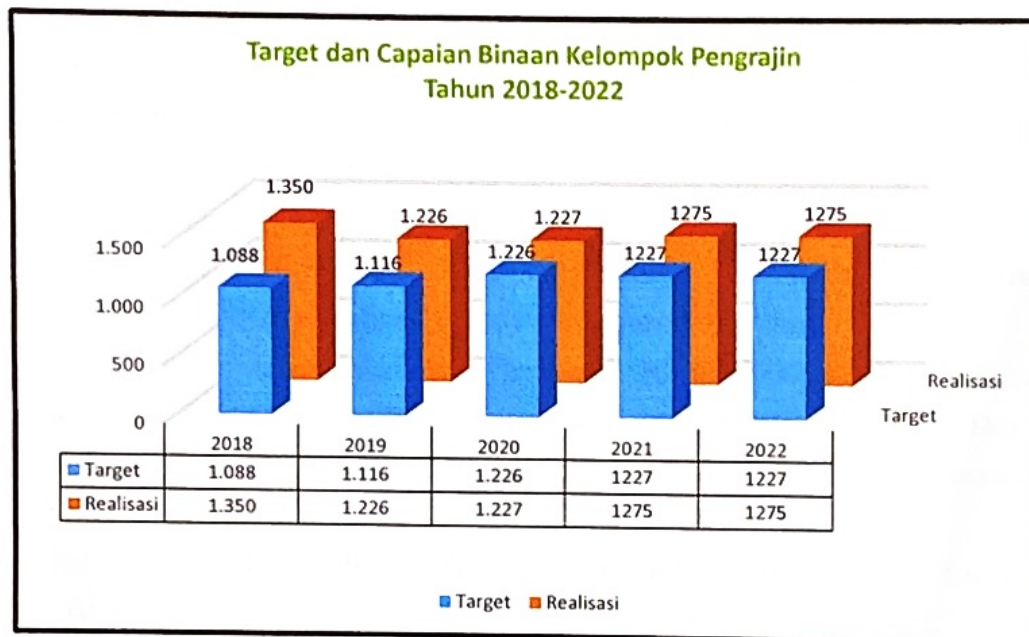
Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- ✓ Belum optimalnya pengembangan sub kawasan distribusi logistik di Kepulauan dan pengembangan kawasan utama di Pamatata

- ✓ Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang berkompeten
- ✓ Belum meratanya pengembangan sentra IKM di 11 kecamatan
- ✓ Belum optimalnya produksi hasil bumi, barang dan jasa sehingga distribusi logistik peti kemas melalui pelabuhan belum maksimal
- ✓ Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca covid 19 dan dampak inflasi

2. CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN/JUMLAH IKM

Gambaran umum progres capaian binaan kelompok pengrajin dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Adapun rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan penghasilan petani khusus pengrajin kopra, meliputi :

1. Membuat regulasi tentang tataniaga kelapa dan turunannya termasuk himbauan mengangkat kearifan lokal tentang pembuatan dan penggunaan minyak kelapa dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pelatihan dan bantuan peralatan pembuatan arang tumpung.
3. Pelatihan dan bantuan peralatan pembuatan carbon aktif.
4. Pelatihan dan peralatan pembuatan vco curah.
5. Sosialisasi pentingnya menumbuhkembangkan kearifan lokal daerah tentang pembuatan minyak goreng dari kelapa dalam serta himbauan melalui surat edaran untuk penggunaannya secara massal oleh masyarakat.



Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.776.331.000,- dan terealisasi sebesar Rp.744.002.200,- dengan capaian output 95,84 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.229.131.000,- terealisasi sebesar Rp.223.231.000,- dengan capaian output 97,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.165.000.000,- terealisasi sebesar Rp.150.552.600,- dengan capaian output 91,24%. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.5.400.000,- terealisasi sebesar Rp.5.220.000,- dengan capaian output 96,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.46.800.000,- terealisasi sebesar Rp.45.267.800,- dengan capaian output 96,73%. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.330.000.000,- terealisasi sebesar Rp.319.730.800,- dengan capaian output 96,89%. Dapat

dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.8.129.742.125,- dan terealisasi sebesar Rp.7.627.629.034,- dengan capaian output 93,82%. Ini Dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.1.720.161.000,- terealisasi sebesar Rp.1.637.858.200,- dengan capaian output 95,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

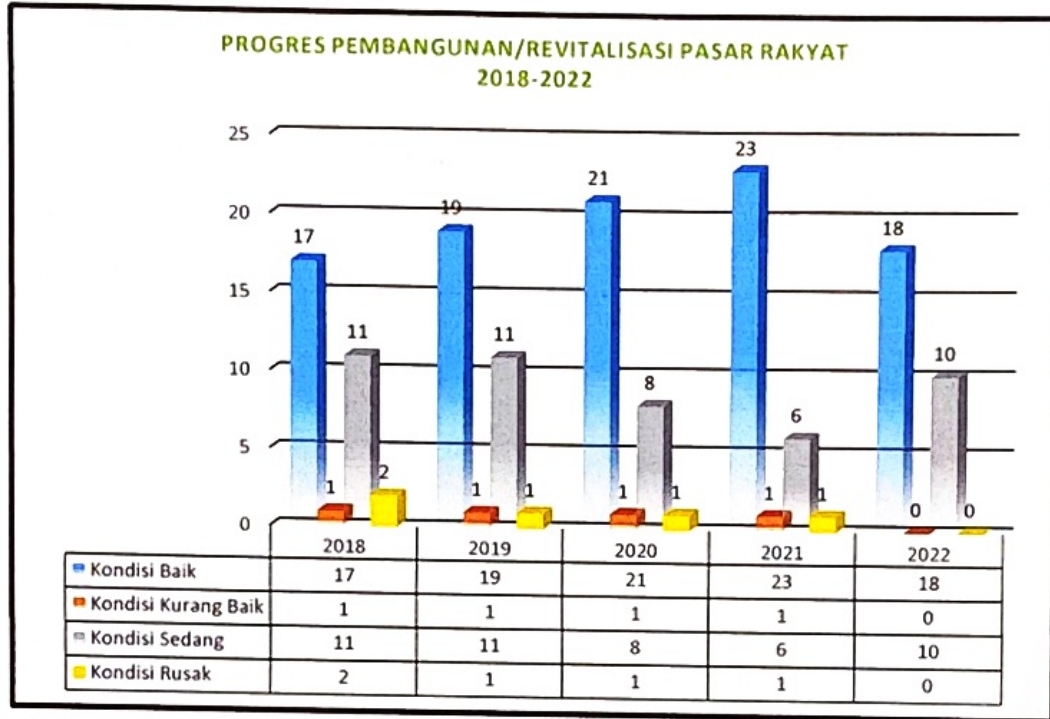
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.6.409.581.125,- terealisasi sebesar 5.989.770.834,- dengan capaian output 93,45%. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



Bidang Perdagangan

Secara garis besar jumlah pasar yang sudah dibangun di Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. MENINGKATNYA JUMLAH PASAR



Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya Bidang Perdagangan terus melakukan berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan.

Dan sebagai apresiasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu dengan diterimanya Tugas Pembantuan pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, dengan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di tujuh kecamatan.

Dana APBN untuk tahun 2018-2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan Tugas Pembantuan Pasar Rakyat sebanyak 10 (delapan) pasar di 9 kecamatan yakni tahun 2022 diamanahkan 2 dana Tugas Pembantuan di 2 (dua) kecamatan, yakni :

- ✓ Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur di Pasimasunggu Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.910.000,-.

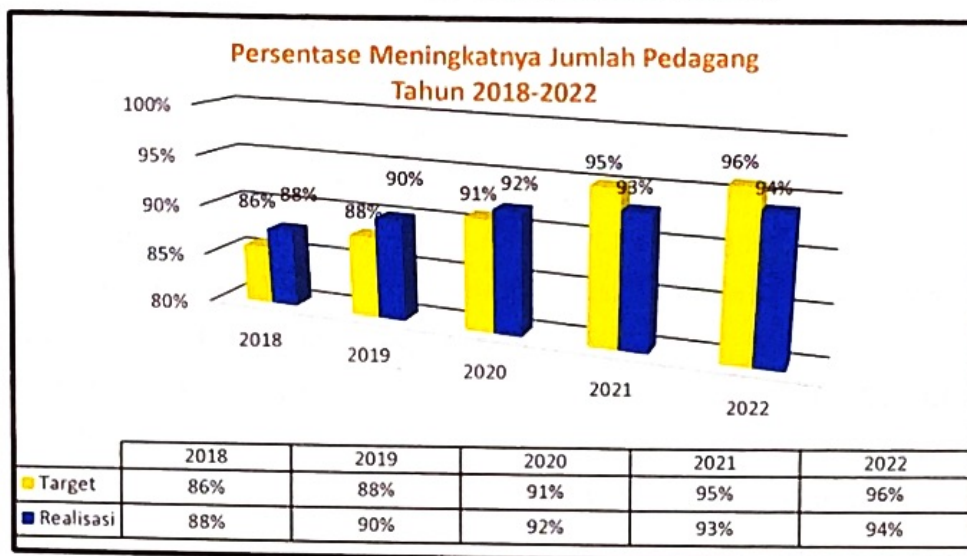


- ✓ Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu dengan anggaran sebesar Rp. 2.801.100.000,-.



Pada tahun ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.130.000.000 menjadi Rp.174.392.450 dengan kenaikan sebesar 34,15%. Selain itu juga, penyaluran dana bantuan dampak inflasi daerah kepada pelaku UMKM berhasil disalurkan sebesar Rp.2.343.200.000 kepada 2133 pelaku IKM/UMKM dengan capaian realisasi sebesar 80,66%.

2. PERSENTASE MENINGKATNYA JUMLAH PEDAGANG



Jumlah pedagang terus meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah pedagang sampai 31 Desember 2022 sebanyak ± 2.557 orang dari 28 pasar (jumlah pedagang berubah ubah seiring dengan waktu tertentu, seperti hari hari besar, terkadang jumlah pedagang bermunculan dari berbagai kalangan dan melebihi dari jumlah pedagang yang terdaftar).

Untuk pencapaian Sasaran IKU ke-2 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan :			
	a. Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	85%	85%	100%
	b. Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	1000	1232	123,2%

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 73.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.022.250,- dengan capaian output 98,22%. Ini



dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 73.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.022.250,- dengan capaian output 98,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.830.000,- dengan capaian output 99,66%. Adapun kegiatannya adalah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan dana yang disediakan sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.830.000,- dengan capaian output 99,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 37.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.290.000,- dengan capaian output 100%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 37.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.290.000,- dengan capaian output 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

4. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.272.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.271.422.200,- dengan capaian output 99,76%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.102.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.101.534.000,- dengan capaian output 99,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

- b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.50.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.018.200,- dengan capaian output 99,64%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

- c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.119.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp.119.870.000,- dengan capaian output 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

5. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.102.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.672.902,- dengan capaian output 99,92%. Adapun kegiatannya adalah Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan dengan dana yang disediakan sebesar Rp.102.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.672.902,- dengan capaian output 99,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

6. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

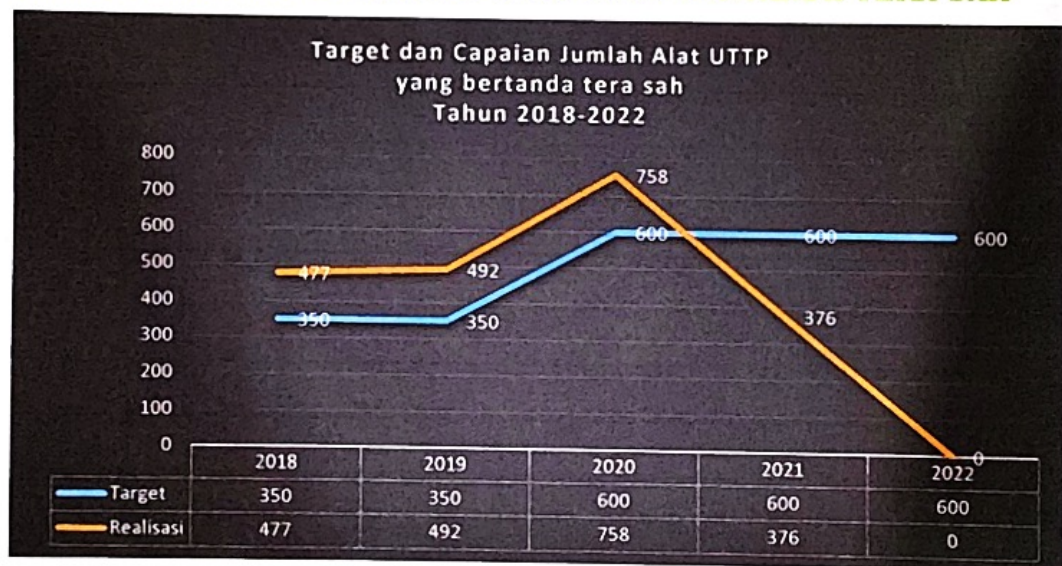
Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.23.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.599.200,- dengan capaian output 98,58%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dengan dana yang disediakan sebesar Rp.23.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.599.200,- dengan capaian

output 98,58%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.



Secara garis besar pencapaian program dan kegiatan kemetrollogian berupa Tera dan Tera Ulang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

MENINGKATNYA JUMLAH ALAT UTTP YANG BERTANDA TERA SAH



Untuk pencapaian Sasaran ke-5 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2022		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
	Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrollogian serta pengawasan barang dan jasa beredar			



a. Persentasi UTTP yang bertanda tera sah	600 UTTP	0 UTTP	0%
---	----------	--------	----

Untuk terciptanya pasar tertib ukur dan terlindunginya konsumen dan pelaku usaha dari kerugian, program/kegiatan pada Bidang Kemetrolgian antara lain:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana kemetrolgian
3. Program pengendalian kemetrolgian

Dengan capaian kinerja ketiga program ini adalah tersedianya alat standar metrologi legal dan kendaraan operasional dan hasil yang ingin dicapai dalam program ini adalah dengan adanya alat UTTP pengawasan secara berkala dapat meminimalisir kekurangan takaran/ukuran yang dapat merugikan konsumen, disamping itu PAD dapat dimaksimalkan karena sudah bisa melakukan tera/tera ulang tanpa bergantung pada BSML.

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.123.581.500,- dan terealisasi sebesar Rp.113.565.400,- dengan capaian output 91,90%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.25.968.500,- terealisasi sebesar Rp.24.620.400,- dengan capaian output 94,81%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.97.613.000,- terealisasi sebesar Rp.88.945.000,- dengan capaian output 91,12%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan



Daftar Rincian Alat UTTP yang ditera/tera ulang

No.	Jenis Alat UTTP	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Takaran Kering	179	199	90	67
2	Timbangan Pegas	135	179	98	136
3	Timbangan Sentisimal	21	14	12	9
4	Meter Kayu	3	6	2	1
5	Timbangan Elektronik	7	9	8	8
6	Dacin Logam	15	17	9	3
7	Miligram	-	-	-	-
8	Anak Timbangan	81	15	25	32
9	Neraca Emas	10	9	3	-
10	Timbangan Bobot	-	1	1	1
11	Ingsut	-	-	-	-
12	SPBU	17	8	15	-
13	Timbangan Meja	1	3	1	-
14	Timbangan Pegas Cepat	-	-	1	-
15	AMP	-	1	1	-
16	Timbangan Digital	-	-	1	-
17	Timbangan Elektronik Emas	-	-	1	-
Jumlah Alat		469	461	268	257
Jumlah Retribusi			Rp.10.404.000	Rp.7.747.000	Rp.3.941.000



Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Peredaran barang/produk dan jasa yang tidak layak pakai, seperti: barang/produk yang sudah kadaluarsa, kemasan dalam keadaan rusak dan lain-lain.
2. Belum optimalnya penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) oleh pelaku usaha.

3. Adanya kesalahan penyataan jabatan pengawas kedalam jabatan fungsional penera sehingga pada Tahun 2022 tidak tersedia tenaga fungsional penera yang menjadi persyaratan penerbitan tanda tera sah.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang/produk yang tidak layal jual dengan memberikan sanksi.
2. Melakukan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pasar tradisional dalam membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha maupun peningkatan PAD.
3. Pembaharuan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) melalui kalibrasi secara berkala dan pengadaan alat yang baru.
4. Segera mengusulkan pengangkatan pejabat fungsional penera yang akan menangani program kegiatan kemetrolagian sehingga tanda tera sah dapat diterbitkan.

Kesekretariatan

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.48.762.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.202.000,- dengan capaian output 98,85%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.12.020.000,- terealisasi sebesar Rp.11.710.000,- dengan capaian output 97,42%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.3.942.000,- terealisasi sebesar Rp.3.942.000,- dengan capaian output 100%. Dapat

dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.7.460.000,- terealisasi sebesar Rp.7.460.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.1.704.000,- terealisasi sebesar Rp.1.704.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.7.382.000,- terealisasi sebesar Rp.7.282.000,- dengan capaian output 98,65%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.8.443.000,- terealisasi sebesar Rp.8.393.000,- dengan capaian output 99,41%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.7.811.000,- terealisasi sebesar Rp.7.711.000,- dengan capaian output 98,72%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.2.880.932.658,- dan terealisasi sebesar Rp.2.822.333.888,- dengan capaian output 97,96%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.2.865.932.658,- terealisasi sebesar Rp.2.807.333.888,- dengan capaian output 97,96%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- dengan capaian output 100 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan capaian output 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- dengan capaian output 100%. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan dana yang disediakan sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- dengan capaian output 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.867.288.600,- dan terealisasi sebesar Rp.866.799.200,- dengan capaian output 99,94%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target



dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.266.960.600,- terealisasi sebesar Rp.266.960.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 133.431.000,- terealisasi sebesar Rp.133.372.200,- dengan capaian output 99,96%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.570.000,- dengan capaian output 95,7%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.36.120.000,- terealisasi sebesar Rp.36.120.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.420.777.000,- terealisasi sebesar Rp.420.777.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.734.372.150,- dan terealisasi sebesar Rp.682.262.900,- dengan capaian output 92,90%. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.26.664.400,- terealisasi sebesar Rp.26.664.400,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.



b. Pengadaan Mebel

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.25.530.000,- terealisasi sebesar Rp.25.530.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.266.328.500,- terealisasi sebesar Rp.266.328.500,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.166.789.250,- terealisasi sebesar Rp.148.766.000,- dengan capaian output 89,19%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.249.060.000,- terealisasi sebesar Rp.214.974.000,- dengan capaian output 86,31%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.646.575.342,- dan terealisasi sebesar Rp.638.552.946,-. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.5.330.000,- terealisasi sebesar Rp.5.330.000,- dengan capaian output 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.163.830.542,- terealisasi sebesar Rp.161.502.546,- dengan capaian output 98,58%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.477.414.800,- terealisasi sebesar Rp.471.720.400,- dengan capaian output 98,81%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.309.877.000,- dan terealisasi sebesar Rp.309.274.500,- dengan capaian output 99,80%. Ini dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target

dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasi atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.97.560.000,- terealisasi sebesar Rp.97.086.000,- dengan capaian output 99,51%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.24.010.000,- terealisasi sebesar Rp.24.010.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.81.700.000,- terealisasi sebesar Rp.81.700.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dari dana yang disediakan sebesar Rp.80.845.000,- terealisasi sebesar Rp.80.845.000,- dengan capaian output 100%. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan dan bidang kemertologian melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Sumber	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Reribusi Pelayanan Pasar	500.000.000	174.392.450	34,87
2.	Layanan Tera/Tera Ulang	25.968.500	24.620.400	94,80
	Jumlah	525.968.500	199.012.850	37,83

2. Belanja dan Realisasi

Berikut Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar :

Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
- Belanja Operasi	12.996.781.600	12.696.048.570	300.733.030	97,69
- Belanja Modal	7.051.753.275	6.984.025.700	67.727.575	99,04
Surplus/(defisit)	20.048.534.875	19.680.074.270	368.460.605	98,16

Dari kedua tabel di atas dapat dijelaskan bahwa surplus/(defisit) anggaran sebesar **Rp. 20.048.534.875,-** terealisasi sebesar **Rp. 19.680.074.270,-** atau **98,16%**.



Penjabaran pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Program dan Kegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Rp.776.331.000,00	Rp.744.002.200,00	95,84
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembentukan Sentra IKM	Rp.229.131.000,00	Rp.223.231.000,00	97,43
	Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Rp.165.000.000,00	Rp.150.552.600,00	91,24
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan	Rp. 5.400.000,00	Rp.5.220.000,00	96,67
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone	Rp.46.800.000,00	Rp.45.267.800,00	96,73
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	pameran Indsutri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri	Rp.330.000.000,00	Rp.319.730.800,00	96,89
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase izin usaha yang dikeluarkan	Rp.8.129.742.125,00	Rp.7.627.629.034,00	93,82
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin	Rp.1.720.161.000,00	Rp.1.637.858.200,00	95,22

	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	usaha Industri			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/Jeneponto	Rp.6.409.581.125,00	Rp.5.989.770.834,00	93,45
3	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan Surat Rekomendasi Perizinan	Rp.20.405.500,00	Rp.17.137.500,00	83,98
4	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaannya	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemanfaatan Fasilitas Tol Laut oleh Consignee dan Pelaku Usaha	Rp.73.327.000,00	Rp.72.022.250,00	98,22
5	Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66
	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar rakyat yang dibina dan dikendalikan	Rp.50.000.000,00	Rp.49.830.000,00	99,66

6	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.37.290.000,00	Rp.37.290.000,00	100
7	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.272.070.000,00	Rp.271.422.200,00	99,76
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga barang dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.102.000.000,00	Rp.101.534.000,00	99,54
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp.50.200.000,00	Rp.50.018.200,00	99,64
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Rp.119.870.000,00	Rp.119.870.000,00	100
8	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92



	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Berpartisipasi dalam Pameran Produk Ekspor Unggulan	Rp.102.760.000,00	Rp.102.672.902,00	99,92
9	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Rp.123.581.500,00	Rp.113.565.400,00	91,90
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Rp.25.968.500,00	Rp.24.620.400,00	94,81
	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Alat UTTP yang layak pakai dan BDKT yang baik	Rp.97.613.000,00	Rp.88.945.000,00	91,12
10	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi dan penggunaan produk dalam negeri	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan	Update Data dan Informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Melalui Sistem Informasi Perdagangan	Rp.23.940.000,00	Rp.23.599.200,00	98,58
11	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Aktif	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Berkualifikasi Sehat	Rp.48.578.000,00	Rp.48.413.000,00	99,66
12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persentase koperasi yang ber-RAT	Rp.163.640.000,00	Rp.163.640.000,00	100
13	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan	Persentase Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan	Rp.553.147.000,00	Rp.550.074.000,00	99,44



	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Daerah			
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan yang terverifikasi sebagai pelaku usaha	Rp.79.400.000,00	Rp.79.344.000,00	99,93
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Rp.203.074.000,00	Rp.202.677.200,00	99,80
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Jumlah Sentra yang dikembangkan	Rp.237.160.000,00	Rp.234.560.000,00	98,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku yang Ikut Latihan	Rp.33.513.000,00	Rp.33.492.800,00	99,94
14	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Unggul dan Kompetitif	Rp.4.170.915.000	Rp.3.428.412.500,00	82,20
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok UMKM Penerima Bantuan	Rp.4.170.915.000	Rp.3.428.412.500,00	82,20
15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (%)	Rp.48.762.000,00	Rp.48.202.000,00	98,85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Rp.12.020.000,00	Rp.11.710.000,00	97,42
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Rp.3.942.000,00	Rp.3.942.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Rp.7.460.000,00	Rp.7.460.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Rp.1.704.000,00	Rp.1.704.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan	Rp.7.382.000,00	Rp.7.282.000,00	98,65

		Anggaran (DPPA)			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LP PD)	Rp.8.443.000,00	Rp.8.393.000,00	99,41
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	Rp.7.811.000,00	Rp.7.711.000,00	98,72
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelengkapan Administrasi Keuangan dan Pelaporan	Rp.2.880.932.658,00	Rp.2.822.333.888,00	97,97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Rp.2.865.932.658,00	Rp.2.807.333.888,00	97,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi BMD yang Tersusun	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelancaran Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan pendaftaran dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Administasi Perkantoran	Rp.867.288.600,00	Rp.866.799.200,00	99,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp.266.960.600,00	Rp.266.960.000,00	100

		Kantor			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase peningkatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.133.431.000,00	Rp.133.372.200,00	99,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.10.000.000,00	Rp.9.570.000,00	95,7
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase peningkatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.36.120.000,00	Rp.36.120.000,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.420.777.000,00	Rp.420.777.000,00	100
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peralatan dan Kelengkapan Penunjang Administrasi Daerah	Rp.734.372.150,00	Rp.682.262.900,00	92,90
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase peningkatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.26.664.400,00	Rp.26.664.400,00	100
	Pengadaan Mebel	Persentase Peningkatan Jumlah Mebeleur yang disediakan	Rp.25.530.000,00	Rp.25.530.000,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Rp.266.328.500,00	Rp.266.328.500,00	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Rp.166.789.250,00	Rp.148.766.000,00	89,19
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.249.060.000,00	Rp.214.974.000,00	86,31

21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Administrasi dan Penunjang Operasional Perkantoran	Rp.646.575.342,00	Rp.638.552.946,00	98,76
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.5.330.000,00	Rp.5.330.000,00	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Rp.163.830.542,00	Rp.161.502.546,00	98,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase peningkatan pelayanan umum kantor	Rp.477.414.800,00	Rp.471.720.400,00	98,81
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	Rp.309.877.000,00	Rp.309.274.500,00	99,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.97.560.000,00	Rp.97.086.000,00	99,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.24.010.000,00	Rp.24.010.000,00	100
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.25.762.000,00	Rp.25.633.500,00	99,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.81.700.000,00	Rp.81.700.000,00	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.80.845.000,00	Rp.80.845.000,00	100

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Meningkatnya keberdayaan masyarakat menjadi pelaku usaha
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai pelatihan/bimtek pengelolaan usaha home industri

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dalam untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang timbul

Bidang Koperasi dan UKM

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN
3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
4. Merestrukturisasi Kelembagaan/Penataan system dan prosedur kinerja organisasi yang professional
5. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
6. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
7. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
8. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
9. Memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.
10. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya
11. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

12. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan.

Bidang Perindustrian

1. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri
2. Memfasilitasi akses permodalan bagi wira usaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan daerah/nasional, BUMN, BUMD dan instansi terkait permodalan usaha.
3. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tanggung dalam memulai usaha.
4. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
5. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang vacum atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.

Bidang Perdagangan

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Melakukan pembinaan diasppek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM/UKM yang kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar.
3. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan: prasarana, informasi, kemitraan, dan perijinan usaha.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang/produk yang tidak layak jual dengan memberikan sanksi.
5. Melakukan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pasar tradisional dalam membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha maupun peningkatan PAD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.29 sesuai format terlampir.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.30 sesuai format terlampir.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran dan posisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Pemerintah Daerah dalam Lingkup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat.

Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah masih

terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah.

Dengan melihat kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang masih lemah dalam menghadapi tantangan khususnya dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati 2021-2026 antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan sub kawasan distribusi logistik di Kepulauan dan pengembangan kawasan utama di Pamatata
2. Tahun 2022 akan dibangun sentra pengolahan ikan di Desa Padang Kecamatan Bontosikuyu
3. Perlunya peningkatan kualitas sentra kerajinan dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana pusat layanan usaha terpadu (PLUT)
4. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi
5. Belum meratanya pengembangan sentra IKM di 11 Kecamatan
6. Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca covid 19 dan dampak inflasi

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Pengembangan UKM dengan optimalisasi pemberdayaan sentra UKM dan produk unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha UMKM dan, perdagangan;
4. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan UMKM lokal;
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
6. Peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan kemetrollogian daerah;
7. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

8. Peningkatan inovasi daerah serta integrasi pembinaan perdagangan, koperasi dan UMKM;
9. Optimalisasi pendapatan dengan upaya intensifikasi pendapatan.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ini sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif;
2. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa;
3. Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra;
4. Peningkatan investasi sector unggulan daerah;
5. Peningkatan derajat hidup manusia yang berkarakter, berbudaya, dan bermartabat;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Review terhadap Rancangan Awal Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.31 sesuai format terlampir.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting



dari masing – masing SKPD yang dibawa ke Forum Organisasi Perangkat Daerah.

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Penelaahan Usulan Masyarakat Hasil Musrembang Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume	Sumber Dana		Lokasi	Pengusul
			APBN	APBD KAB		
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>					
	- Peralatan Bagi UMKM, Bantuan Pengembangan Alat	1 Paket		√	Kel. Putabangun Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar	Miswar Wahyudi Nasir Leha, S.E.
	- Bantuan Peralatan bagi UMKM, Bantuan Pengembangan Alat	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan/ Kelurahan, Kab. Kepulauan Selayar	Miswar Wahyudi Nasir Leha, S.E.

- Bantuan Alat Penggilingan jagung	1 Paket		√	Kec. Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar	Sukri, S.IP
- Bantuan Alat Perbengkelan	1 Paket		√	Seluruh kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	H. M. Suwadi, S.E.
- Bantuan Alat Pertukangan	1 Paket		√	Seluruh kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	H. M. Suwadi, S.E.
- Bantuan kelompok Alat pertukangan	1 Paket		√	Benteng, Kab. Kepulauan Selayar	Muhammad Aqsa Ramadhan AA
- Bantuan Kelompok Alat perbengkelan	1 Paket		√	Benteng, Kab. Kepulauan Selayar	Muhammad Aqsa Ramadhan AA
- Bantuan Kelompok Alat memasak	1 Paket		√	Benteng, Kab. Kepulauan Selayar	Muhammad Aqsa Ramadhan AA
- Permintaan alat perbengkelan roda dua	1 Paket		√	Lingkungan Parappa Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar	Andi Jamarong, S.Sos
- Permintaan bantuan Alat pertukangan kayu	1 Paket		√	Gusung barat Desa Bontolebang Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar	Andi Jamarong, S.Sos
- Pengadaan Bantuan Depot Air Minum Isi Ulang	1 Paket		√	Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar	Drs. Syamsul Bakhri

- Bantuan Alat Pertukangan	1 Paket		√	Dusun Tambera Desa Polebunging Kec. Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar	Ali Yathas, S.T.
- Bantuan Alat Pertukangan Kelompok Usaha Pertukangan Oge Pakampong	1 Paket		√	Kel. Benteng Utara Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar	M. Affandi, S.E.
- Bantuan Modal Usaha	1 Paket		√	Kec. Bontomatene, Buki & Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Eni Sutiyono
- Bantuan Usaha Perbengkelan	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Eni Sutiyono
- Bantuan Usaha Pertukangan	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Eni Sutiyono
- Pengadaan Depot Air	1 Paket		√	Desa Lowa Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar	Muhammad Anas Ali, S.H.
- Pengadaan Alat Perbengkelan	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
- Pengadaan alat pertukangan	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
- Pengadaan Peralatan tata rias	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.

- Pelatihan Membuat Kuliner makanan Khas Selayar	1 Paket		√	Kec. benteng, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
- Bantuan Pengepakan/Pengemasan	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
- Pelatihan Bioponik, Menanam Sayur Mayur di Lahan sempit	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
- Alat rumah tangga	1 Paket		√	Seluruh kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Kasmawati Bachtiar, S.Pd
- Alat rumah tangga	1 Paket		√	Desa lalangbata, Kab. Kepulauan Selayar	Kasmawati Bachtiar, S.Pd
- Bantuan Kelompok Peralatan jahit	1 Paket		√	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar	Muhammad Aqsa Ramadhan AA
- Permintaan Modal usaha	1 Paket		√	Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar	Andi Jamarong, S.Sos
- Memberikan Pelatihan Anak Muda	1 Paket		√	Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
- Kursus Menjahit	1 Paket		√	Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.

	- Pelatihan Tataboga / Pembuatan Kue	1 Paket		√	Kec. Benteng , Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
	- Pelatihan Menjahit	1 Paket		√	Bonehalang Benteng Selatan , Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
	- Pengadaan Mesin Jahit	1 Paket		√	Bonehalang Benteng Selatan , Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
	- Pelatihan Menjahit	1 Paket		√	Ling. Bonehalang Kel. Benteng Selatan , Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
	- Kursus menjahit	1 Paket		√	Ling. Panggiliang Utara , Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
	- Pelatihan Kewirausahaan	1 Paket		√	Desa Bonea Timur Ling. Balang hibung Kec. benteng , Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.
	- Pelatihan Penguatan kapasitas Perangkat kelurahan	1 Paket		√	Ling. Balang hibung Kec. benteng , Kab. Kepulauan Selayar	Hj. Maryani Ali, S.E.



Sebagian besar dapat diakomodir dikarenakan usulan tersebut memang benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan ada usulan yang tidak dapat diakomodir dikarenakan berbagai hal antara lain keterbatasan penyediaan dana. Selain usulan kegiatan dari APBD kabupaten, juga mengusulkan kegiatan untuk memperoleh dana dari APBD provinsi dan APBN.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.32 sesuai format terlampir.





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana untuk desa
4. Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat desa
5. Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin
6. Perluasan lapangan kerja
7. Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM melalui pemberdayaan potensi, peningkatan nilai tambah dan penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan serta berbasis potensi lokal
8. Mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan produk lokal
9. Meningkatkan produk unggulan daerah
10. Meningkatkan promosi dan pengembangan usaha pelaku Koperasi dan UKM
11. Peningkatan jaringan distribusi logistik untuk menjadikan Kepulauan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik kawasan Timur Indonesia
12. Pengembangan Kawasan distribusi logistik, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
13. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan
14. Meningkatkan perdagangan daerah dengan penguatan pasar dalam negeri

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Dengan berlandaskan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yakni **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut dimana visi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah: **“Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan”** Visi tersebut di atas mengandung makna:

1. Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang kuat yaitu untuk mendukung *Perekonomian Daerah yang Kuat* dilandasi perekonomian daerah berbasis *Kerakyatan*
2. Berdaya Saing dan berkelanjutan yakni partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri

2. Sasaran

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan terdapat sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Komponen Manajemen Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan pagu indikatif tahun 2024 dalam Renstra, namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum bisa diakomodir karena keterbatasan dana/pagu indikatif yang sudah ditetapkan.

✦ Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik yang menjadi skala prioritas

✦ Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka ditetapkan proyeksi belanja sesuai prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	2024		OPD Penanggung Jawab
				Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	Persen	100	100.000.000	Disdag KUKM
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatk	Persen	100	192.226.592	Disdag KUKM

		an perlindung an				
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayak an	Persen	100	631.187.296	Disdag KUKM
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatka n kapasitasn ya	Persen	100	250.000.000	Disdag KUKM
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Persen	100	226.200.000	Disdag KUKM
6	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatk an izin usaha simpan pinjam	Persen	100	10.000.000	Disdag KUKM
7	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen	100	100.000.000	Disdag KUKM

8	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	Persen	100	100.000.000	Disdag KUKM
9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	Persen	100	50.000.000	Disdag KUKM
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	205.019.505	Disdag KUKM
11	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Persen	21	0	Disdag KUKM
12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur yang ditera	Persen	10	100.000.000	Disdag KUKM
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipasarkan	Persen	37	0	Disdag KUKM



- ✦ Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah:

Tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan pada tahun mendatang.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.33 sesuai format terlampir.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disesuaikan dengan pagu indikatif yang disetujui dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, penjabaran rencana kerja dapat dilihat pada lampiran.

Program Prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Mendukung 3 Program Prioritas dan 1 Program Unggulan Gerbang Sari Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

Bidang Perdagangan :

- ❖ Kegiatan Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- ❖ Kegiatan Penyusunan zona kawasan distribusi logistik
- ❖ Kegiatan Pengembangan hubungan dan simpul logistik untuk pendorong distribusi komoditas potensi di Kab. Kep. Selayar
- ❖ Kegiatan Pencanaan daerah tertib ukur

Bidang Koperasi dan UKM :

- ❖ Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
- ❖ Kegiatan Peningkatan Akses kepada Sumber daya Produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi dengan tujuan Mewujudkan kemandirian koperasi dan UKM sebagai pelaku strategis dalam perekonomian
- ❖ Kegiatan Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Mandiri Maju dan Wawasan Lingkungan dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber daya koperasi dan UKM
- ❖ Kegiatan Peningkatan Peran Koperasi dan UKM Sebagai Penopang Ekonomi Nasional Yang Kokoh Dalam Rangka Kebangkitan Ekonomi Nasional dengan



tujuan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel T-C.33 sesuai format terlampir.



BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Pemerintah Daerah.

Rekomendasi Perumusan Program dan Kegiatan adalah :

1. Setiap program dan kegiatan baik usulan dari masyarakat hasil musrenbang maupun usulan OPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah.
2. Pengembangan usaha di tiap sektor harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan.

Monitoring dan evaluasi senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal OPD, antar OPD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

5.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya



yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian rencana kerja disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

LAMPIRAN



1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (8+7+9)	11= (10/4)
1.	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	-
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	11	2,75
3.	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	5	2,5
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	4	Orang	1	Orang	8	2
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	2	Orang	1	Orang	4	2
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	%	100	%	1	49	249	2,49
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Paket	70	Paket	1	70	210	3
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	94	Paket	75	Paket	1	60	205	2,18
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	6	2
4.	Facilities Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	500	Laporan	500	Laporan	1	0	1000	2
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282	Laporan	272	Laporan	1	240	784	2,78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	%	100	%	1	95	295	2,95
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	2	Unit	1	0	4	2
2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Unit	7	Unit	1	0	14	2
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	7	Unit	1,6	0	18	2,57
4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2	Unit	0,5	0	3	1,5
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	1	3	3
6.	Penatausahaan Asep dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-
7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	%	100	%	1	44	244	2,44
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Laporan	100	Laporan	1	50	250	2,5
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	1	2	8	2,7
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	52	Laporan	1	25	129	2,5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	%	100	%	1	20	220	2,2
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	0	2	2
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Unit	-	Unit	-	1	-	-
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	Unit	1	7	27	2,7
4.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	Unit	-	Unit	-	-	-	-
5.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	Unit	-	Unit	-	-	-	-
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	1	1	5	2,5
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	Unit	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/8)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan (%)	100	%	100	%	1	0	%	2
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	200	Izin	200	Izin	1	0	Izin	2
	1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250	Dokumen	250	Dokumen	1	0	Dokumen	2
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri		-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diberikan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pemertasaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	100	%	100	%	1	0	%	2
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah saran dan prasarana dalam kondisi baik	30	Sarana	30	Sarana	1	0	Sarana	2
	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	1	Unit	1	0	Unit	2

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2	Unit	2	Unit	1	0	4	2
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	30	Sarana	30	Sarana	1	0	60	2
1.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	0	2	2
2.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	0	2	2
4.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	50	%	50	%	1	10	110	2.2
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	11	Kecamatan	11	Kecamatan	1	0	22	2
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Kabupaten	1	Kabupaten	1	0	2	2
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Laporan	1	Laporan	1	0	2	2
3.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Laporan	1	Laporan	1	0	2	2
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan	100	%	100	%	1	20	220	2.2
1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	1	0	2	2
2.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	Laporan	1	Laporan	1	0	2	2
3.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	1	0	2	2
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawali penggunaannya	4	Jenis	4	Jenis	1	0	8	2
1.	Pemeriksaan kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	7	Dokumen	7	Dokumen	1	0	14	2
2.	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	Laporan	1	Laporan	1	0	2	2
3.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	Laporan	1	Laporan	1	0	2	2
6.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	25	%	15	%	1	0	32	1.28
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perusahaan pasar yang dikembangkan	15	Jenis	15	Jenis	1	0	30	2
1.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	6	Pelaku Usaha	6	Pelaku Usaha	1	0	12	2
2.	Pameran dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2	Pelaku Usaha	2	Pelaku Usaha	1	0	4	2
3.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2	Pelaku Usaha	2	Pelaku Usaha	1	0	4	2
4.	Misi Dagang Bagi Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	Pelaku Usaha	2	Pelaku Usaha	1	0	4	2
5.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6	Produk	6	Produk	1	0	12	2
6.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	6	Pelaku Usaha	6	Pelaku Usaha	1	0	12	2
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur yang ditera	10	%	10	%	1	5	25	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pendidikan dan Latihan Pergerakan bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkerjasama	Koperasi	Koperasi	Koperasi	Koperasi	0,37	0	41	1,37
	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkerjasama	60	60	60	Orang	1	0	120	2
	12. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	100	100	100	%	1	0	200	2
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	6	6	6	Koperasi	1	0	12	2
	1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	6	6	6	Orang	1	0	12	2
	13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	50	50	50	%	1	16	116	2,32
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendidikan, Pelatihan, kemudahan perizinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pendidikan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	150	150	150	UMKM	1	0	300	2
	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bersifat Tumbuh, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	30	Unit Usaha	1	0	90	3
	2. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melakukan Kemitraan Usaha Mikro	30	30	30	Unit Usaha	1	0	105	3,5
	3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3	3	3	Unit Usaha	1	1	7	2,333333333
	4. Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200	200	200	Unit Usaha	1	0	400	2
	5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150	150	150	Orang	1	0	300	2
	14. Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	50	50	50	%	1	0	100	2
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)	50	50	50	UMK	1	0	100	2
	1. Fasilitas Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	37	37	37	Unit Usaha	1	0	74	2

Benteng, 17 Juli 2023



TABEL T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

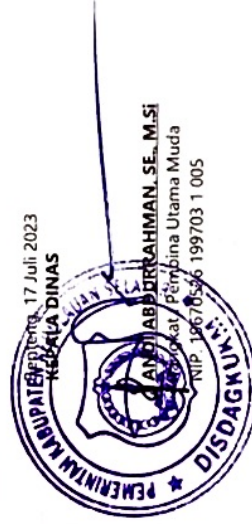
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			80%	82%	84%	86%	80%	82%	84%	86%	
12			Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	18,25%	19,25%	21,25%	23,25%	18,25%	19,25%	21,25%	23,25%	
13			Persentase koperasi sehat	12,15%	13,15%	14,15%	15,15%	12,15%	13,15%	14,15%	15,15%	
14			Persentase koperasi KSP/USP yang sehat	11,15%	12,15%	13,15%	14,15%	11,15%	12,15%	13,15%	14,15%	
15			Persentase pengurus koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	10,51%	11,51%	12,51%	13,51%	10,51%	11,51%	12,51%	13,51%	
16			Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan pendanaan	82,42%	85,50%	88%	91,50%	82,42%	85,50%	88%	91,50%	
17			Persentase UMKM yang diberdayakan	22,72%	22,77%	22,82%	22,87%	22,72%	22,77%	22,82%	22,87%	
18			Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	22,78%	22,83%	22,88%	22,93%	22,78%	22,83%	22,88%	22,93%	
19			Persentase rekomendasi izin usaha sektor perdagangan yang diterbitkan	55%	60%	65%	70%	55%	60%	65%	70%	
20			Persentase sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaan	40%	50%	60%	70%	40%	50%	60%	70%	
21			Persentase jenis komoditi yang dipantau	55%	60%	65%	70%	55%	60%	65%	70%	
22			Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	17%	19%	21%	23%	17%	19%	21%	23%	
23			Persentase alat ukur yang ditera	10,12%	12,04%	13,12%	14,31%	10,12%	12,04%	13,12%	14,31%	
24			Persentase produk lokal yang dipasarkan	28%	33%	37%	39%	28%	33%	37%	39%	



TABEL T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	(12)
1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Kep. Selayar	Persentase jenis komoditi yang dipantau	100	467.578.197	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Kep. Selayar	Persentase jenis komoditi yang dipantau	50	421.200.350	
2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Kab. Kep. Selayar	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	100	10.250.300	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Kab. Kep. Selayar	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	100	10.000.000	
3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Kab. Kep. Selayar	Persentase UMKM yang Diberdayakan	100	613.187.296	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Kab. Kep. Selayar	Persentase UMKM yang Diberdayakan	50	613.187.100	
4	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	100	155.859.399	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kep. Selayar	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	100	55.019.100	
5	Program pengembangan ekspor	Kab. Kep. Selayar	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	21	187.031.279	Program pengembangan ekspor	Kab. Kep. Selayar	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	21	0	



TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Program Pengembangan UMKM	Kab. Kep. Selayar	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	50%	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab. Kep. Selayar	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Usaha Mikro	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	37 Unit Usaha	
	Peralatan Bagi UMKM, Bantuan Pengembangan Alat Kelengkapan Mesin Air Minum dalam kemasan	Kel. Putabangun Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Verifikasi Perangkat Daerah
	Bantuan Peralatan bagi UMKM, Bantuan Pengembangan Alat Kelengkapan Depot Air	Seluruh Kecamatan/Kelurahan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Alat Perbengkelan	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Alat Pertukangan	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Kelompok Alat pertukangan	Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Kelompok Alat perbengkelan	Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Kelompok Alat memasak	Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Permintaan alat perbengkelan roda dua	Kepulauan Selayar Lingkungan Parappa Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Permintaan bantuan Alat pertukangan kayu	Gusung Barat Desa Bontolebang Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pengadaan Bantuan Depot Air Minum Isi Ulang	Kecamatan Pasimarannu, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun Tambara Desa Polebunging Kec. Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
	Bantuan Alat Pertukangan Kelompok Usaha Pertukangan Oge Pakampong	Kel. Benteng Utara Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Modal Usaha	Kec. Bontomatene, Buki & Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Usaha Perbengkelan	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Usaha Pertukangan	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pengadaan Depot Air	Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pengadaan Alat Perbengkelan	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pengadaan alat pertukangan	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pengadaan Peralatan tata rias	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pelatihan Membuat Kuliner makanan Khas Selayar	Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Pengepakan/Pengemasan	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Bantuan Kelompok Peralatan Jahit	Seluruh Kecamatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Permintaan Modal usaha	Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Memberikan Pelatihan Anak Muda	Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Kursus Menjahit	Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pelatihan Tataboga / Pembuatan Kue	Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pelatihan Menjahit	Kepulauan Selayar Bonehalang Benteng Selatan, Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besar Volume	Catatan
	Pengadaan Mesin Jahit	Bonehalang Selatan Kel. Benteng Selatan , Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pelatihan Menjahit	Ling. Bonehalang Kel. Benteng Selatan , Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Kursus menjahit	Ling. Panggiling Utara , Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui
	Pelatihan Kewirausahaan	Ling. Balang hibung Kec. benteng , Kab. Kepulauan Selayar		1 Paket	Usulan disetujui

Benteng, 17 Juli 2023



Tabel T.C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode			Usulan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Rencana Tahun 2025				
					Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	2	17	02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha	Kab. Kep. Selayar	100%	10.000.000		Kab. Kep. Selayar	100%	10.248.102
2	2	17	02	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkn Izin Usaha	Kab. Kep. Selayar	2 Koperasi	5.000.000		Kab. Kep. Selayar	2 Koperasi	5.000.000
2	2	17	02	0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	5 000 000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5 000 000
2	2	17	02	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Koperasi 1 Koperasi 1 Usaha	5 000 000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.248.102
2	2	17	03	0003	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	5 000 000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.248.102
3	2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	Kab. Kep. Selayar	14,15%	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	14,15%	103.000.000
2	2	17	03	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi persentohan	3 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	3 Koperasi	103.000.000
4	2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kep. Selayar	162 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	162 Unit Usaha	51 000 000
2	2	17	04	0001	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	52.000.000
2	2	17	04	2.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	10 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	145.998.722
2	2	17	04	2.02	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Pemodal	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	145.998.722
2	2	17	04	2.03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Pemodal	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	2 Unit Usaha	52.000.000
5	2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	93.998.722
2	2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	50%	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	50%	102.000.000
2	2	17	05	2.02	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	35 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	35 Koperasi	102.000.000
6	2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlingungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	Kab. Kep. Selayar	60 Orang	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	60 Orang	102.000.000
2	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlingungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	100%	192.226.500		Kab. Kep. Selayar	100%	196.838.108
2	2	17	06	2.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi Sehat	6 Koperasi	192.226.500		Kab. Kep. Selayar	6 Koperasi	196.838.108
2	2	17	06	2.03	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	6 Unit Usaha	192.226.500		Kab. Kep. Selayar	6 Unit Usaha	196.838.108
7	2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Kab. Kep. Selayar	50%	613.187.100		Kab. Kep. Selayar	50%	627.897.860

2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	30 UMKM	613.187,100	Kab. Kep. Selayar	30 UMKM	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	627.997.660
2	17	07	2.01	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	152.000.000	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	156.000.000
2	17	07	2.01	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	83.000.000	Kab. Kep. Selayar	200 Unit Usaha	Kab. Kep. Selayar	200 Unit Usaha	86.000.000
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 Unit Usaha	125.000.000	Kab. Kep. Selayar	3 Unit Usaha	Kab. Kep. Selayar	3 Unit Usaha	128.000.000
2	17	07	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	152.000.000	Kab. Kep. Selayar	150 Orang	Kab. Kep. Selayar	150 Orang	155.000.000
2	17	07	2.01	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar	30 Unit Usaha	101.187.100	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	102.897.660
8	2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapabilitas	60%	250.000.000	Kab. Kep. Selayar	60%	Kab. Kep. Selayar	60%	257.000.000
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Stala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapabilitas	30 Usaha Mikro	250.000.000	Kab. Kep. Selayar	30 Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar	30 Usaha Mikro	257.000.000
2	17	08	2.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	37 Unit Usaha	250.000.000	Kab. Kep. Selayar	37 Unit Usaha	Kab. Kep. Selayar	37 Unit Usaha	257.000.000
3	30			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN								
9	3	30	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	6.534.093.932	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	100%	6.600.846.494
3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100%	176.000.000	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	100%	198.000.000
3	30	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.000.000	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	40.000.000
3	30	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.500.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	19.000.000
3	30	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.500.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	19.000.000
3	30	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	13.000.000
3	30	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	13.000.000
3	30	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	46.000.000	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	46.000.000
3	30	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	41.000.000	Kab. Kep. Selayar	13 Laporan	Kab. Kep. Selayar	13 Laporan	45.000.000
3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	4.374.508.932	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	100%	4.424.437.906
3	30	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.339.179.232	Kab. Kep. Selayar	39 Orang/bulan	Kab. Kep. Selayar	39 Orang/bulan	4.382.937.906
3	30	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.310.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	17.500.000
3	30	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	11.000.000	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	13.000.000
3	30	01	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 laporan	9.017.700	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	11.000.000
3	30	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun	100%	11.000.000	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	100%	13.000.000
3	30	01	2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	11.000.000	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	13.000.000
3	30	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	Kab. Kep. Selayar		Kab. Kep. Selayar		32.000.000
3	30	01	2.04	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	7.000.000
3	30	01	2.04	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	25.000.000
3	30	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	45.000.000	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	100%	56.200.000

3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	15.000.000	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	17.000.000
3	30	01	2.05	0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10.000.000
3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Selayar	2 Orang	20.000.000	Kab. Kep. Selayar	2 Orang	29.200.000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	100%	788.190.000	Kab. Kep. Selayar	100%	708.900.000
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	70 Paket	200.000.000	Kab. Kep. Selayar	70 Paket	211.000.000
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	87 Paket	70.000.000	Kab. Kep. Selayar	87 Paket	72.000.000
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	9.420.000	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	11.000.000
3	30	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Selayar	500 Laporan	34.650.000	Kab. Kep. Selayar	500 Laporan	37.000.000
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	272 Laporan	474.120.000	Kab. Kep. Selayar	272 Laporan	375.900.000
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	100%	402.131.000	Kab. Kep. Selayar	100%	422.000.000
3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	33.892.000	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	40.000.000
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	144.699.000	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	150.000.000
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	105.540.000	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	110.000.000
3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	118.000.000	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	122.000.000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kab. Kep. Selayar	100	690.640.000	Kab. Kep. Selayar	100	807.000.000
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selayar	100 Laporan	7.500.000	Kab. Kep. Selayar	100 Laporan	11.000.000
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	3 Laporan	86.340.000	Kab. Kep. Selayar	3 Laporan	88.000.000
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	52 Laporan	496.800.000	Kab. Kep. Selayar	52 Laporan	508.000.000
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	147.826.000	Kab. Kep. Selayar	100%	144.308.588
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	80.630.000	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	68.600.000
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep. Selayar	10 Unit	16.580.000	Kab. Kep. Selayar	10 Unit	22.000.000
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	50.416.000	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	53.708.508
10	3	30	2		Program Pertizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	Kab. Kep. Selayar	100%	26.000.000	Kab. Kep. Selayar	100%	82.000.000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kep. Selayar	200 Izin	26.000.000	Kab. Kep. Selayar	200 Izin	26.000.000
3	30	02	2.01	0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	250 Dokumen	25.000.000	Kab. Kep. Selayar	250 Dokumen	26.000.000
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengacar dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	-	0	Kab. Kep. Selayar	-	26.000.000
3	30	02	2.05	0001	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengacar dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	26.000.000
11	3	30	3		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Kab. Kep. Selayar	100%	66.018.100	Kab. Kep. Selayar	100%	210.019.508
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	66.018.100	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	66.019.508
3	30	03	2.01	0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	55.019.100	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	56.019.505
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	0	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	164.000.000

3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	0		1 Dokumen	102.000.000
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	0		Kab. Kep. Selayar	52.000.000
12	3	30	04		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting	Persentase jenis komoditas yang dipantau (%)	Kab. Kep. Selayar	421.200.350		Kab. Kep. Selayar	231.400.000
3	30	04	2.01		Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	Kab. Kep. Selayar	98.200.200		Kab. Kep. Selayar	127.000.000
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	0		Kab. Kep. Selayar	26.000.000
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	51.000.000
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	46.200.200		Kab. Kep. Selayar	50.000.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ditendalikan	Kab. Kep. Selayar	325.000.150		Kab. Kep. Selayar	104.400.000
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	75.000.000		Kab. Kep. Selayar	52.000.000
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	250.000.150		Kab. Kep. Selayar	52.400.000
14	3	30	06		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur yang ditera	Kab. Kep. Selayar	80.000.000		Kab. Kep. Selayar	102.000.000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTPP bertanda tera SAH yang berlaku	Kab. Kep. Selayar	80.000.000		Kab. Kep. Selayar	102.000.000
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pertimbangan Ditera Ulang	Kab. Kep. Selayar	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	51.000.000
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Kep. Selayar	30.000.000		Kab. Kep. Selayar	51.000.000
Total										8.480.725.982	8.639.240.591

Bontoleng, 17 Juli 2023

KABUPATEN BINA



ABDURRAHMAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670526 199703 1 005

Tabel T-C. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Rencana Tahun 2025			
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	2 17		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
2	2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha	Kab. Kep. Selayar	100%	10.000.000		Kab. Kep. Selayar	100%	10.248.102
2	2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkn Izin Usaha	Kab. Kep. Selayar	2 Koperasi	6.000.000		Kab. Kep. Selayar	2 Koperasi	6.000.000
2	2 17 02 2.01 0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pemabukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.000.000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.000.000
2	2 17 02 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	1 Koperasi 1 Koperasi 1 Usaha	6.000.000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	6.248.102
2	2 17 02 2.02 0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.000.000		Kab. Kep. Selayar	1 Unit Usaha	5.248.102
3	2 17 03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	Kab. Kep. Selayar	14,15%	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	14,15%	103.000.000
	2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi percontohan	Kab. Kep. Selayar	3 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	3 Koperasi	103.000.000
	2 17 03 2.01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kep. Selayar	162 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	162 Unit Usaha	51.000.000
	2 17 03 2.01 0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	52.000.000
4	2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	145.998.722
2	2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	10 Koperasi	145.998.722
2	2 17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	2 Unit Usaha	52.000.000
2	2 17 04 2.01 0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodal	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	50.000.000		Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	93.998.722
5	2 17 05	Program Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	Kab. Kep. Selayar	60%	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	60%	102.000.000
2	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkeroperasian	Kab. Kep. Selayar	35 Koperasi	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	35 Koperasi	102.000.000
2	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkeroperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian	Kab. Kep. Selayar	60 Orang	100.000.000		Kab. Kep. Selayar	60 Orang	102.000.000
6	2 17 06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	Kab. Kep. Selayar	100%	192.226.500		Kab. Kep. Selayar	100%	196.838.108
2	2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Kab. Kep. Selayar	6 Koperasi	192.226.500		Kab. Kep. Selayar	6 Koperasi	196.838.108

2	17	06	2.01	0006	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Kep. Selayar	6 Unit Usaha	192.226.500		Kab. Kep. Selayar	6 Unit Usaha	196.839.108
7	2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Kab. Kep. Selayar	60%	613.187.100		Kab. Kep. Selayar	50%	627.897.660
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kab. Kep. Selayar	30 UMKM	613.187.100		Kab. Kep. Selayar	30 UMKM	627.897.660
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	152.000.000		Kab. Kep. Selayar	30 Unit Usaha	156.000.000
2	17	07	2.01	0003	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Kep. Selayar	200 Unit Usaha	83.000.000		Kab. Kep. Selayar	200 Unit Usaha	86.000.000
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		3 Unit Usaha	125.000.000			3 Unit Usaha	128.000.000
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kep. Selayar	150 Orang	152.000.000		Kab. Kep. Selayar	150 Orang	155.000.000
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		30 Unit Usaha	101.187.100			30 Unit Usaha	102.897.660
8	2	17	08		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kep. Selayar	60%	260.000.000		Kab. Kep. Selayar	60%	257.000.000
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kep. Selayar	30 Usaha Mikro	260.000.000		Kab. Kep. Selayar	30 Usaha Mikro	257.000.000
2	17	08	2.01	0006	Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Kep. Selayar	37 Unit Usaha	250.000.000		Kab. Kep. Selayar	37 Unit Usaha	257.000.000
3	30				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN								
9	3	30	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	Kab. Kep. Selayar	100%	6.584.093.932		Kab. Kep. Selayar	100%	6.800.846.494
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	100%	175.000.000		Kab. Kep. Selayar	100%	196.000.000
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	35.000.000		Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	40.000.000
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	16.500.000		Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	19.000.000
3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	16.500.000		Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	19.000.000
3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000		Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	13.000.000
3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	10.000.000		Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	13.000.000
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	46.000.000		Kab. Kep. Selayar	4 laporan	48.000.000
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	13 Laporan	41.000.000		Kab. Kep. Selayar	13 Laporan	45.000.000
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Kep. Selayar	100%	4.374.506.932		Kab. Kep. Selayar	100%	4.424.437.908
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	39 Orang/bulan	4.339.179.232		Kab. Kep. Selayar	39 Orang/bulan	4.382.937.908
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	15.310.000		Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	17.500.000
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	11.000.000		Kab. Kep. Selayar	12 laporan	13.000.000

3	30	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	9 017 700	Kab. Kep. Selayar	12 laporan	11 000 000
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun	Kab. Kep. Selayar	100%	11 000 000	Kab. Kep. Selayar	100%	13 000 000
3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0
3	30	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0
3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	11 000 000	Kab. Kep. Selayar	4 laporan	13 000 000
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Kab. Kep. Selayar		0	Kab. Kep. Selayar		32 000 000
3	30	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	7 000 000
3	30	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	25 000 000
3	30	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0
3	30	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Perentase peningkatan administrasi kepegawalan perangkat daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	45 000 000	Kab. Kep. Selayar	100%	56 200 000
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	0	Kab. Kep. Selayar	1 Paket	0
3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	15 000 000	Kab. Kep. Selayar	4 Dokumen	17 000 000
3	30	01	2.05	0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10 000 000	Kab. Kep. Selayar	2 Dokumen	10 000 000
3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Selayar	2 Orang	20 000 000	Kab. Kep. Selayar	2 Orang	29 200 000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Kantor	Kab. Kep. Selayar	100%	788 190 000	Kab. Kep. Selayar	100%	706 900 000
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	70 Paket	200 000 000	Kab. Kep. Selayar	70 Paket	211 000 000
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	87 Paket	70 000 000	Kab. Kep. Selayar	87 Paket	72 000 000
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	9 420 000	Kab. Kep. Selayar	3 Dokumen	11 000 000
3	30	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Selayar	500 Laporan	34 650 000	Kab. Kep. Selayar	500 Laporan	37 000 000
3	30	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selayar	272 Laporan	474 120 000	Kab. Kep. Selayar	272 Laporan	375 900 000
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	402 131 000	Kab. Kep. Selayar	100%	422 000 000
3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	33 892 000	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	40 000 000
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	144 699 000	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	150 000 000
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	105 540 000	Kab. Kep. Selayar	7 Unit	110 000 000
3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	118 000 000	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	122 000 000
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	0
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	100	590 640 000	Kab. Kep. Selayar	100	607 000 000
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selayar	100 Laporan	7 500 000	Kab. Kep. Selayar	100 Laporan	11 000 000
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Selayar	3 Laporan	86 340 000	Kab. Kep. Selayar	3 Laporan	88 000 000

3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	Kab. Kep. Selayar	52 Laporan	Kab. Kep. Selayar	496.800.000		52 Laporan	508.000.000
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase kelancaran administrasi barang milik daerah	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	147.628.000		100%	144.308.588
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	Kab. Kep. Selayar	80.630.000		1 Unit	68.600.000
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kep. Selayar	Unit	Kab. Kep. Selayar	0		Unit	0
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep. Selayar	10 Unit	Kab. Kep. Selayar	16.580.000		10 Unit	22.000.000
3	30	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	Kab. Kep. Selayar	0		1 Unit	0
3	30	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	Kab. Kep. Selayar	0		1 Unit	0
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	Kab. Kep. Selayar	50.416.000		2 Unit	53.708.588
3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	Kab. Kep. Selayar	0		1 Unit	0
10	3	30	2		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Perentase izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	28.000.000		100%	52.000.000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Perentase peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kep. Selayar	200 Izin	Kab. Kep. Selayar	28.000.000		200 Izin	28.000.000
3	30	02	2.01	0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	250 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	25.000.000		250 Dokumen	26.000.000
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Kep. Selayar	-	Kab. Kep. Selayar	0		-	0
3	30	02	2.02	0001	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	0		1 Dokumen	0
3	30	02	2.03		Penerimaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	-	Kab. Kep. Selayar	0		-	0
3	30	02	2.03	0001	Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan waralaba (STPW) dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	0		1 Dokumen	0
3	30	02	2.03	0002	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	0		1 Dokumen	0
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kab. Kep. Selayar	-	Kab. Kep. Selayar	0		-	28.000.000
3	30	02	2.05	0001	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	0		1 Dokumen	26.000.000
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kep. Selayar	-	Kab. Kep. Selayar	0		-	0
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	Kab. Kep. Selayar	0		1 Laporan	0
3	30	02	2.06	0002	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	0		1 Dokumen	0
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	Kab. Kep. Selayar	0		1 Laporan	0
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Kab. Kep. Selayar	-	Kab. Kep. Selayar	0		-	0
3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	Kab. Kep. Selayar	0		1 Dokumen	0
11	3	30	3		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Kab. Kep. Selayar	100%	Kab. Kep. Selayar	55.018.100		100%	210.019.505

3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	55.019.100	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	55.019.100	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	56.019.605
3	30	03	2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	0	Kab. Kep. Selayar	1 Unit	0
3	30	03	2.01	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	55.019.100	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	55.019.100	Kab. Kep. Selayar	2 Unit	56.019.505
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	0	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	0	Kab. Kep. Selayar	30 Sarana	154.000.000
3	30	03	2.02	Peminaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0		1 Dokumen	102.000.000
3	30	03	2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	1 Dokumen	52.000.000
12	3	30	04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	Kab. Kep. Selayar	50%	421.200.350	Kab. Kep. Selayar	50%	421.200.350	Kab. Kep. Selayar	50%	231.400.000
3	30	04	2.01	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah kabupaten/kota	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	96.200.200	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	96.200.200	Kab. Kep. Selayar	11 Kecamatan	127.000.000
3	30	04	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	26.000.000
3	30	04	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	11 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	11 Laporan	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	11 Laporan	51.000.000
3	30	04	2.01	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	46.200.200	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	46.200.200	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	50.000.000
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan	Kab. Kep. Selayar	1 Kabupaten	325.000.150	Kab. Kep. Selayar	1 Kabupaten	325.000.150	Kab. Kep. Selayar	1 Kabupaten	104.400.000
3	30	04	2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	75.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	75.000.000	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	52.000.000
3	30	04	2.02	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	250.000.150	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	250.000.150	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	52.400.000
3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah jenis pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi penggunaannya	Kab. Kep. Selayar	4 Jenis	0	Kab. Kep. Selayar	4 Jenis	0	Kab. Kep. Selayar	4 Jenis	0
3	30	04	2.03	Pemeriksaan kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kep. Selayar	7 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	7 Dokumen	0	Kab. Kep. Selayar	7 Dokumen	0
3	30	04	2.03	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0
3	30	04	2.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0	Kab. Kep. Selayar	1 Laporan	0
13	3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Kab. Kep. Selayar	21%	0	Kab. Kep. Selayar	21%	0	Kab. Kep. Selayar	21%	0
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan	Kab. Kep. Selayar	15 Jenis	0	Kab. Kep. Selayar	15 Jenis	0	Kab. Kep. Selayar	15 Jenis	0
3	30	05	2.01	Pameran dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0
3	30	05	2.01	Pameran dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0
3	30	05	2.01	Misi Dagang Bagi Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0	Kab. Kep. Selayar	2 Pelaku Usaha	0
3	30	05	2.01	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Kep. Selayar	6 Produk	0	Kab. Kep. Selayar	6 Produk	0	Kab. Kep. Selayar	6 Produk	0
14	3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur yang ditera	Kab. Kep. Selayar	10%	80.000.000	Kab. Kep. Selayar	10%	80.000.000	Kab. Kep. Selayar	10%	102.000.000
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTP terdapat tera SAH yang berlaku	Kab. Kep. Selayar	80	80.000.000	Kab. Kep. Selayar	80	80.000.000	Kab. Kep. Selayar	80	102.000.000
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Ditera Ulang	Kab. Kep. Selayar	650 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	650 Unit	50.000.000	Kab. Kep. Selayar	650 Unit	51.000.000
3	30	06	2.01	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Kep. Selayar	231 Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar	231 Orang	30.000.000	Kab. Kep. Selayar	231 Orang	51.000.000
3	30	06	2.01	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kep. Selayar	1500 Unit	0	Kab. Kep. Selayar	1500 Unit	0	Kab. Kep. Selayar	1500 Unit	0
15	3	30	7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipasarkan	Kab. Kep. Selayar	37%	0	Kab. Kep. Selayar	37%	0	Kab. Kep. Selayar	37%	0

3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	Kab. Kep. Selayar	5 Media	0	Kab. Kep. Selayar	5 Media	0
3	30	07	2.01	0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	0	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	0
3	30	07	2.01	0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemiripan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	0	Kab. Kep. Selayar	100 UMKM	0
Total								8.480.726.982			8.480.726.982

Benteng, 17 Juli 2023
KEPALA DINAS

